

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH SETDA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Martha Nathasya Lotu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
lotuthasya76@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara parsial. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 43 yang merupakan staf yang terlibat langsung dalam penerapan SIPKD, peneliti mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis secara parsial diketahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien determinasi sebesar 15% sedangkan 85% lainnya dipengaruhi faktor lain.

Kata kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This research was conducted at the Office of the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara. The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on the quality of local government financial reports at the Regional Finance Agency of East Nusa Tenggara Province partially. The number of samples in this study were 43 who were staff who were directly involved in the implementation of SIPKD, the researchers took samples using the purposive sampling method. Data collection techniques in this study using a questionnaire. The data analysis technique in this study used simple linear regression analysis. Based on the results of the partial analysis, it is known that the Regional Financial Management Information System (SIPKD) affects the quality of financial reports with a coefficient of determination of 15% while the other 85% is influenced by other factors.

Keywords: Regional Financial Information System, Quality Of Financial Reports.

PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir di seluruh bidang kehidupan manusia baik dalam kehidupan sehari-hari atau untuk organisasi, tidak lepas dari yang namanya teknologi dan informasi. Menurut *Information Technology Association of America (ITAA)* teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan dan manajemen sistem informasi berbasis komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindahkan, dan memperoleh informasi (Martasari, 2017).

Semakin pentingnya Teknologi Informasi (TI) bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran dan fungsi sistem informasi. Adanya penggunaan TI dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut para aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi. Terjadi perubahan yang terkait dengan laporan-laporan yang harus dibuat para pengelola keuangan (bendahara, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta diharuskannya proses akuntansi berupa jurnal dan buku besar dalam menghasilkan laporan keuangan masing-masing SKPD. Semakin banyak dan rumitnya tugas para pengelola keuangan daerah, kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa tugas para pengelola keuangan jauh lebih banyak dan rumit dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Terlaksananya penggunaan teknologi informasi, tugas-tugas para pengelola keuangan daerah akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam (BPK, 2006) yang memperkenankan dipergunakannya

aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rohiman et al., 2019) bahwa penerapan SIPKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin efektif penerapan SIPKD maka lebih semakin berkualitas laporan keuangan. Demi mempermudah pengelolaan keuangan daerah, dibuatlah suatu sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor SE.900/984/BAKD tanggal 21 September 2006, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan Daerah SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri SE.900/122/BAKD perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dengan Implementasi SIPKD Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa tujuan utama kegiatan SIPKD Regional SIKD adalah dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan Aplikasi Keuangan Daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Namun secara umum, Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sesuai dengan prosedur, tetapi dalam kenyataannya SKPD belum bisa membuktikan kebenaran yaitu mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Padahal dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan suatu alat yang penting digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum dapat dipastikan penggunaan Aplikasi SIPKD memiliki pengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah atau tidak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan

Kuangan Pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

KAJIAN TEORI

Technology Acceptance Model (TAM)

Model TAM adalah teori sistem informasi yang memuat model mengenai sikap individu untuk menerima dan menggunakan teknologi. Teori TAM diadopsi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku personal untuk menerima dan menggunakan teknologi. Dua faktor tersebut adalah kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan kebermanfaatan (*usefulness*).

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use Perceived*)

Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa “*ease*” artinya “*freedom from difficulty or great effort*”. Selanjutnya “*ease to use perceived*” didefinisikan “*the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”. Jika diaplikasikan untuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka maksudnya pengguna meyakini kalau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

2. Persepsi Kebermanfaatan (*Usefulness Perceived*)

Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance*”. Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah akan meningkatkan kinerjanya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dibuat oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan dua kali, yaitu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri, 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan, 2011 dengan tujuan agar dapat mempercepat transfer data dan efisiensi dalam menyatukan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD.

Jika *heading* anda melebihi satu, gunakan level kedua heading seperti di bawah ini. Pengutipan dilakukan dengan mencantumkan. Nama penulis dan tahun penerbitan mengikuti kalimat. Penomoran harus diberikan pada gambar (gambar, grafik, foto dan peta), tabel dan persamaan matematika berdasarkan urutannya

Hipotesis

Ho: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ha: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Sampel diperoleh dengan *purposive sampling* yaitu teknik sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana kriteria dalam penelitian ini antara lain: yaitu staf yang terlibat langsung dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui jumlahnya, maka dalam menentukan sampel dapat digunakan rumus berikut:

$$y = \alpha + \beta x$$
$$\beta = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$
$$\alpha = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$R^2 = (0,387)^2 \times 100\%$$
$$= 0,149769 \times 100\%$$
$$= 14,97\% \text{ dibulatkan (15\%)}$$

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden. Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala likert.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi, uji kualitas, analisis regresi sederhana, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Keuangan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Februari 1954 nomor: UP.50/I/39-544 dengan nama Kantor Pejabat Sementara (PS) Kepala Daerah Tingkat 1 NTT yang termasuk didalamnya Bagian Keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: UP.I/I/ ND tahun 1955 maka terbentuklah Badan Keuangan yang pada saat itu dipimpin oleh W. A. Tomodok Asisten Wedana Golongan E2/PGPN 1955 mantan pegawai keuangan dari kantor Gubernur di Singaraja. Pada saat peneliti melakukan penelitian ini, kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Drs. Zakarias Moruk, MM.

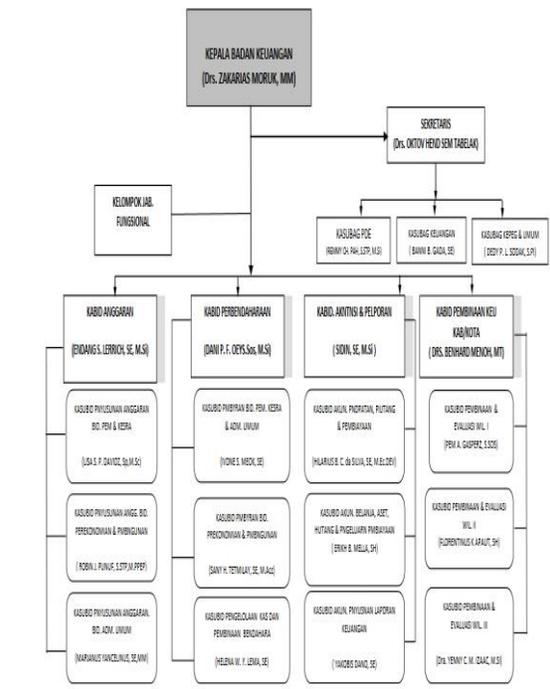
Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat,
3. Bidang Anggaran,
4. Bidang Perbendaharaan,
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan,
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi maupun personalia Jabatan Struktural Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini:



Gambar 1. Struktur organisasi dan personalia jabatan struktural badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Nusa Tenggara Timur, beralamat di jalan El Tari. Jumlah kuesioner yang disebar 43 kuesioner. Jumlah responden ini dinilai cukup memadai sebagai sampel penelitian karena memenuhi persyaratan sampel besar, yaitu lebih dari tiga puluh subjek penelitian.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Kuesioner penelitian ini dibuat dan disebar secara langsung oleh peneliti dan data kuesioner dapat diolah 100%. Demografi responden yang dibahas pada bagian ini mencakup jenis kelamin dan usia responden.

a) Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pendeskripsian pertama yang dilakukan yaitu dari data jenis kelamin. Jenis kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu perempuan dan laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pendeskripsian kedua yang dilakukan yaitu dari data usia. Usia muda berada pada 25 tahun dan usia tua berada pada 55 tahun. Data usia 43 orang responden.

Statistik deskriptif

Penerapan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum 47, nilai maksimum sebesar 71 dan nilai rata-rata sebesar 61,28. Variabel kualitas laporan keuangan mempunyai nilai minimum 44, nilai maksimum sebesar 60 dan nilai rata-rata sebesar 56,51. Jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan lebih rendah rata-ratanya dibandingkan dengan penerapan SIPKD sehingga penerapan SIPKD memiliki nilai rata-rata tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat pengaruh mengenai penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

hasil dari uji validitas variabel X Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tidak terdapat butir pernyataan yang tidak valid karena item variabel telah memenuhi syarat validitas dengan memiliki signifikansi $< 0,005$.
2. a. Uji Reabilitas SIPKD

koefisien reliabilitas instrumen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) memenuhi syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi $>$ dari 0,60 atau di atas 60% dengan menunjukkan *cronbach alpha* sebesar 0,894.

b. Uji Reabilitas Kualitas Laporan Keuangan

koefisien reliabilitas instrumen Kualitas Laporan Keuangan (Y) memenuhi syarat untuk reliabilitas karena memiliki korelasi $>$ dari 0,60 atau di atas 60% dengan menunjukkan *cronbach alpha* sebesar 0,956.
3. Uji t

Perumusan Hipotesis

Ho: Tidak Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ha: Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a) Penetapan Kriteria

Besarnya nilai t tabel untuk taraf signifikan 5% db = 41 (db = N – 2 untuk N =43) yaitu 1,68288.

b). Hasil t hitung

Hasil t hitung diperoleh dengan menggunakan SPSS 26.0 *for windows* yaitu sebesar 2,686.

c) Pengambilan Keputusan

Jika t hitung lebih besar dari t table maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 2,686 di atas dibandingkan dengan t tabel (db = 41) yaitu 1,68288 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan kata lain menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.

d) Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut terbukti bahwa “Ada Pengaruh Antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

4. Koefisien Determinan (R^2)

Setelah r hitung diketahui sebesar 0,387 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan r^2 yang dinyatakan dalam persentase.

Hasilnya sebagai berikut:

$$R^2 = (0,387)^2 \times 100\%$$

$$= 0,149769 \times 100\%$$

$$= 14,97\% \text{ dibulatkan (15\%)}$$

besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0,387 dan dijelaskan besarnya

prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil pengkuadratan r, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0,150 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur) adalah sebesar 15% dan selebihnya yang 85% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab menjalankan sistem tersebut.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tugas Pokok dari sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan selalu dimulai dari Perencanaan, mengorganisir sampai dengan memimpin dan mengendalikan. Asumsi selanjutnya adalah apabila fungsi-fungsi tersebut dijalankan dengan semestinya maka sasaran yang ingin dicapai SKPD tersebut akan tercapai tanpa banyak mengalami kesulitan. Dalam hubungan ini maka terdapat satu aspek yang penting yaitu perlunya suatu sistem pendukung yang memungkinkan semua fungsi pengelolaan khususnya perencanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban berjalan dengan baik artinya tercipta sinkronisasi antara satu dengan yang lain. Sistem pendukung dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Semakin besar dan kompleks lingkup kerja suatu organisasi semakin dirasakan perlunya sistem pendukung tersebut agar pengelolaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien Sistem dimaksud juga harus mampu memproses dan mengkomunikasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian, Implementasi di lapangan dan pertanggungjawaban kepada mereka yang berkepentingan yaitu untuk Pimpinan untuk bahan pengambilan keputusan. Dewasa ini, Pemerintah terus menerus memperbaharui diri terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga Sistem Informasi sangat diperlukan dan menjadi pertimbangan bagi Pimpinan

dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan Sistem Informasi Manajemen yang menjadi topik pada SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan suatu sistem informasi yakni Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem ini diadakan oleh Departemen Dalam Negeri untuk membantu Daerah dalam rangka penerapan BPK, 2006 yakni membangun dan mengembangkan perangkat lunak (*software*) Aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang memiliki akurasi yang tinggi dan mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Tugas Pokok Badan Keuangan adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintahan di bidang keuangan. Untuk membangun kinerja sebagaimana rumusan tugas pokok tersebut diatas maka kebijakan di bidang keuangan tersebut adalah Penyusunan Anggaran Daerah, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di mana dalam pelaksanaannya bersifat Aspiratif, Transparan, Akuntabel dan Tepat Waktu serta Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Kesemuanya itu diramu dalam kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan yakni membangun kompetensi utama administrasi publik yang mampu menjawab tantangan isu-isu yang berkembang di masyarakat sehingga Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan, akuntabel, represif dan berorientasi pada kepentingan publik guna peningkatan pelayanan prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional agar dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan, meningkatkan kualitas SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuntut laporan keuangan daerah yang semakin variatif dan informatif yang bersifat desentralisasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adapun kewajiban pelaporan yang harus disiapkan di daerah seperti APBD beserta Ringkasan dan Penjabaran. Dalam hal ini, guna mendukung

proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan solusi permasalahan diatas. Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis, Transparan, Efektivitas dan Akuntabilitas. Berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD Tanggal 21 September 2006, Provinsi NTT ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini sejalan dengan indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi NTT sudah dapat membantu dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, SIPKD sangat mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

SIPKD meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka sangat

ditunjang oleh faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Berdasarkan teori TAM pada sikap individu terdapat dua faktor untuk menerima dan menggunakan teknologi, yang pertama kemudahan penggunaan (*easy of use*) dan kebermanfaatan (*usefulness*). Kemudahan penggunaan, maksudnya pengguna meyakini kalau sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi ini atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti, dkk (2016), Yusup (2016), Widayanti (2019), Effendi (2019) dan Prabowo (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang menunjukkan jika program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) telah diterapkan dengan baik maka akan dihasilkan laporan keuangan yang efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, auditabel, akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu dibuat suatu sistem yaitu SIPKD yang merupakan seperangkat Sistem Aplikasi yang terintegrasi, yang digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasarkan asas Efisiensi, Ekonomis,

Transparan, Efektivitas dan Akuntabilitas. Berdasarkan SE. Mendagri Nomor 900/984/BAKD Tanggal 21 September 2006, Provinsi NTT ditunjuk sebagai salah satu Daerah Media Inkubator atas pelaksanaan SIPKD, dan penerapan sistem ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 pada Badan Keuangan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Asas-asas ini sejalan dengan indikator kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah SETDA Pemerintah Provinsi NTT sudah dapat membantu dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, SIPKD sangat mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

SIPKD meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah maka sangat ditunjang oleh faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan sistem yang berjalan sehingga SIPKD berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Berdasarkan teori TAM pada

Saran

1. Diharapkan bagi Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi NTT lebih meningkatkan kinerja pegawai dengan memperkuat *computer attitude*, dengan memberikan pengarahan untuk pegawainya dapat menerima teknologi

- (menggunakan komputer) sehingga meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan komputer dan sistem yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan, karena dengan penerimaan atau penggunaan teknologi dapat meningkatkan kemampuan agar dapat membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan hasil kerja yang berkualitas, tepat waktu dan efektif dengan cara yang mudah dan tidak menemui kesulitan ataupun kendala.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan metode kualitatif agar dapat dengan jelas menggambarkan dengan lengkap menemukan informasi terkait pengaruh penerapan SIPKD dapat menggunakan variabel lain selain SIPKD seperti pengendalian intern, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Martasari, N. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah (Pemerintah Kabupaten Gresik). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur*.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri*. (2007). 1–13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan*. (2011).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. (N.D.). https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005. (2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 09 Desember*, 105. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
- Rohiman, A., Prijanto, D., Prabowo, A., Ratdomopurbo, A., Setiawan, R., Effendi, M., & Wahyudi, E. (2019). Geochemical Characteristics of Volcanic Rocks from Mt. Masurai's Caldera, Jambi, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1204(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1204/1/012070>
- Yusup Maulana. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149–160.